

ABSTRAK

KONSTRUKSI HUKUM PERILAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER DI INDONESIA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

Oleh : Kintan Egidhya Brigita Sari

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Moh Zeinudin, SH.,S.H.I.,M.Hum

Dosen Pembimbing Pendamping : Arif Santos, S.H., M.Si

Lesbian, gay, biseksual dan transgender) merupakan Perilaku seksual yang menyimpang yang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang. Hal ini bertentangan dalam pelaksanaan serta dalam pemajuan Hak Asasi Manusia dalam suatu negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Konstruksi hukum yang mengatur perilaku Lesbian, gay, biseksual, dan transgender berdasarkan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dan bagaimana akibat hukum terhadap perilaku Lesbian, gay, biseksual, dan transgender di Indonesia.

Metode dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini bersifat deskriptif, analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan metode pendekatan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang mengatur tentang perilaku Lesbian, gay, biseksual, dan transgender di Indonesia diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE, dan Pasal 36 UU Pornografi. Penting untuk meneguhkan hak asasi manusia suatu negara sebagai kerangka dalam pembangunan hukum hak asasi manusia yang harmonis dan selaras dengan tujuan dan cita masyarakat. Konsepsi hak asasi manusia di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesiaseperti nilai moral, kesusilaan dan agama. Nilai tersebut adalah kristalisasi dari Pancasila.

Berdasarkan konstruksi ini maka sulit bagi Lesbian, gay, biseksual, dan transgender untuk diakui atau dilegalkan di Indonesia karena bertentangan dengan nilai – nilai yang hidup dalam bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila. Pemerintah harus membuat peraturan perundang – undangan yang dapat mengendalikan perilaku menyimpang Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Namun pemerintah harus tetap menjamin dan melakukan perlindungan terhadap hak – hak Lesbian, gay, biseksual, dan transgender sepanjang tidak bertentangan dengan nilai – nilai yang dianut bangsa Indonesia.

Kata Kunci: LGBT, Konstruksi Hukum, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER CONDUCT LAW CONSTRUCTION IN INDONESIA BASED ON HUMAN RIGHTS

By : Kintan Egidhya Brigita Sari

Main Advisor: Dr. Moh Zeinudin, SH.,S.H.I.,M.Hum

Advisory Lecturer: Arif Santos, S.H., M.Si

Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) is a deviant sexual behavior carried out by groups of people who have a deviant sexual orientation. This is contrary to the implementation and promotion of human rights in a country.

This study aims to analyze the legal construction that regulates the behavior of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender based on Human Rights in Indonesia, and what are the legal consequences for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender actors in Indonesia.

The method in this study is normative by using a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). This research is descriptive in nature, data analysis was carried out qualitatively, using a deductive approach.

The results of this study indicate that the legal construction governing the behavior of Lesbians, gays, bisexuals and transgenders in Indonesia is regulated in Article 27 paragraph 1 of the ITE Law, and Article 36 of the Pornography Law. It is important to uphold a country's human rights as a framework in the development of human rights law that is harmonious and aligned with the goals and ideals of society. The concept of human rights in Indonesia cannot be separated from the values that live in Indonesian society, such as moral values, decency and religion. This value is the crystallization of Pancasila.

Based on this construction, it is difficult for Lesbians, Gays, Bisexuals and Transgenders to be recognized or legalized in Indonesia because they conflict with the values that live in the Indonesian nation as contained in Pancasila. The government must make laws and regulations that can control the deviant behavior of Lesbians, Gays, Bisexuals and Transgenders. However, the government must continue to guarantee and protect the rights of Lesbians, Gays, Bisexuals and Transgenders as long as they do not conflict with the values of the Indonesian nation.

Keywords: LGBT, Legal Construction, Human Rights.